



PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PPKn DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK SISWA: STUDI PUSTAKA

Budi Azhari Muda Hasibuan^{1*}, Suci Rahayu², Ipsa Sipahutar³

^{1*,2,3} Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

email : budiazhari85@gmail.com^{1*}, suci38996@gmail.com², ipsasipahutar2005@gmail.com³

Dikirim: 29 Mei 2026, **Revisi:** 7 Juni 2026, **Diterima:** 15 Juni 2026, **Diterbitkan:** 2 Juli 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai media pembelajaran dalam membentuk kesadaran politik siswa melalui pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan partisipatif, sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu-isu politik serta nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila. Melalui pemanfaatan konten digital seperti video, infografis, dan diskusi daring, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan politik, tetapi juga mengembangkan sikap kritis, toleransi, dan keterampilan partisipasi politik. Namun demikian, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, ujaran kebencian, serta rendahnya literasi digital yang dapat memengaruhi pola pikir siswa. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif guru dalam mengintegrasikan literasi digital dengan pembelajaran PPKn serta melakukan pendampingan yang tepat agar media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana edukasi politik. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi mitra strategis dalam membentuk generasi muda yang sadar politik, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Kata kunci: Media Sosial, Politik, Literasi Digital, Siswa, PPKn.

Abstract

The rapid development of information technology, particularly social media, has significantly transformed the learning process, including in Civic Education (PPKn). This study aims to analyze the role of social media as a learning medium in fostering students' political awareness through a literature review approach. The findings indicate that social media has great potential as an interactive, contextual, and participatory learning tool, enabling students to better understand political issues as well as democratic values, human rights, and Pancasila principles. Through the use of digital content such as videos, infographics, and online discussions, students not only acquire political knowledge but also develop critical thinking, tolerance, and political participation skills. However, the use of social media also presents challenges, including misinformation, hate speech, and low levels of digital literacy, which may negatively influence students' perspectives. Therefore, the active role of teachers is essential in integrating digital literacy into Civic Education and providing proper guidance to ensure the effective use of social media as a medium for political education. In conclusion, social media can serve as a strategic partner in shaping politically aware, critical, and responsible young citizens.

Keywords: Social Media, Politics, Digital Literacy, Students, PPKn.

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berkeadilan. Salah satu tujuan utama mata pelajaran PPKn adalah mengembangkan kesadaran politik peserta didik agar mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Kesadaran politik mencakup pemahaman terhadap sistem politik, kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu publik, serta kemauan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Namun, kondisi pembelajaran PPKn di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran sering kali berorientasi pada penguasaan konsep dan hafalan materi, sehingga kurang mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas sosial-politik yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Mulyani, 2022). Akibatnya, siswa cenderung memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi kurang memiliki

kemampuan untuk menganalisis dan menyikapi berbagai isu politik yang berkembang di lingkungan masyarakat maupun ruang digital.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan generasi muda. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 79% dari total populasi, dengan kelompok usia pelajar dan remaja menjadi salah satu pengguna terbesar. Sementara itu, laporan Digital Indonesia 2024 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari untuk mengakses media sosial. Platform seperti Instagram, *TikTok*, *YouTube*, dan *X (Twitter)* menjadi sumber utama informasi bagi generasi muda, termasuk informasi yang berkaitan dengan isu politik, kebijakan publik, dan kehidupan demokrasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang berpengaruh dalam membentuk persepsi, opini, dan sikap politik generasi muda. Peserta didik tidak lagi hanya memperoleh informasi politik dari buku teks atau penjelasan guru, tetapi juga dari berbagai konten digital yang mereka akses setiap hari. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang besar bagi pembelajaran PPKn untuk memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar yang kontekstual, aktual, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Di sisi lain, derasnya arus informasi digital juga menimbulkan berbagai persoalan yang dapat memengaruhi kualitas kesadaran politik siswa.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus penyebaran hoaks dan disinformasi masih banyak ditemukan pada berbagai platform media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik dan kebijakan publik. Selain itu, laporan Amnesty International (2024) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan regulasi dan literasi yang memadai berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, penyebaran ujaran kebencian, diskriminasi, serta pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa peserta didik sebagai pengguna aktif media sosial rentan terpapar informasi yang tidak akurat apabila tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik.

Melihat kondisi tersebut, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang inovatif untuk mengembangkan kesadaran politik peserta didik. Melalui penggunaan infografis, video edukatif, podcast, diskusi daring, maupun analisis konten isu-isu aktual, peserta didik dapat diajak memahami konsep demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, dan nilai-nilai Pancasila secara lebih kontekstual dan aplikatif (Kusumawati, 2024). Pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang lebih aktif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung bersifat satu arah.

Meskipun demikian, pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran PPKn tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan dan pendampingan yang tepat. Tanpa literasi digital yang memadai, peserta didik berpotensi mengalami misinformasi, polarisasi, maupun penguatan sikap intoleran yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila (Susanti, 2022). Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam mengarahkan penggunaan media sosial agar tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang efektif dalam membangun kesadaran politik peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara potensi besar media sosial sebagai sarana pembelajaran dengan berbagai risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, kajian mengenai penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan kesadaran politik siswa menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, peluang, serta tantangan pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran PPKn guna meningkatkan kesadaran politik peserta didik di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau *library research*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengintegrasikan dan menganalisis berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan

kesadaran politik siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur dengan teknik *review (peer review)* yang relevan dari buku akademik, artikel jurnal nasional, laporan lembaga pendidikan, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan kesadaran politik siswa

Proses dilanjutkan dengan analisis data, menginterpretasi dan menyintesis data dari berbagai sumber sesuai dengan kriteria. Penelitian dengan metode studi pustaka dilakukan untuk mendapat informasi, sehingga yang diperoleh bukan duplikasi namun berupa analisis melalui berbagai referensi (Syahfitri & Firdaus, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep media pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran, media pembelajaran menempati posisi yang penting sebagai bagian dari sistem pembelajaran yang saling berkaitan. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pemanfaatan berbagai produk teknologi sebagai inovasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai sarana yang tersedia di sekolah yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pemilihan media yang sederhana, terjangkau, tetapi tetap efektif dan efisien menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, penguasaan pengetahuan tentang media pembelajaran merupakan kompetensi yang perlu dimiliki guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran (Dinayati, 2023).

Media pembelajaran juga merupakan salah satu instrumen yang berperan dalam memfasilitasi penyampaian pengetahuan, informasi, dan nilai-nilai pendidikan agar proses pembelajaran berlangsung secara optimal. Dalam pembelajaran PPKn, media tidak hanya berfungsi sebagai pendukung visualisasi materi, tetapi juga sebagai wahana untuk mentransformasikan nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial. Keberhasilan pembelajaran PPKn sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih dan memanfaatkan media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Media tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, melainkan juga membantu peserta didik dalam memahami konsep, mengembangkan sikap reflektif, serta mendorong partisipasi aktif selama proses pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran PPKn harus mampu mengkonkretkan konsep-konsep yang bersifat abstrak, seperti nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat dipahami secara lebih mudah dan mendalam oleh peserta didik (Kusumawati, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek pendidikan. Dampak dari perkembangan tersebut terlihat pada munculnya berbagai inovasi dalam metode dan proses pembelajaran, baik yang berorientasi pada pembelajaran individual maupun pembelajaran secara klasikal. Salah satu bentuk inovasi yang berperan penting dalam transformasi pendidikan adalah e-learning. Pemanfaatan media sosial sebagai platform pendukung e-learning memungkinkan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh menjadi lebih efektif dan mudah diakses. Kehadiran e-learning berbasis media sosial memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia karena mampu mengurangi hambatan geografis serta keterbatasan waktu, sehingga akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat diperoleh oleh masyarakat secara lebih luas (Mialiawati & Yusuf, 2021).

Media sosial dan platform digital dapat diartikan sebagai berbagai aplikasi serta layanan berbasis internet yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, bertukar gagasan, dan berkolaborasi secara terbuka dalam ruang digital. Dalam konteks pembelajaran PPKn, keberadaan media sosial menawarkan potensi yang besar sebagai sarana edukasi yang kontekstual, komunikatif, dan partisipatif. Pemanfaatan media tersebut dinilai relevan untuk mendukung proses pembelajaran karena mampu menjangkau generasi muda yang sehari-harinya berinteraksi dengan teknologi digital. Karakteristik peserta didik dari Generasi Z dan Generasi Alpha yang lebih menyukai konten visual, interaktif, dan bersifat real-time dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang hanya berpusat pada ceramah dan buku

teks. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi jembatan efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, HAM, dan keadilan sosial dalam format yang lebih menarik dan relatable (Kusumawati, 2025).

Pengertian dan penggunaan media sosial dalam era digital

Menurut Mandibergh, media sosial merupakan media yang memfasilitasi kerja sama antarpengguna dalam menghasilkan dan membagikan konten yang dibuat sendiri oleh pengguna (*user-generated content*). Sejalan dengan pendapat tersebut, Boyd mendefinisikan media sosial sebagai sekumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, berkomunikasi, serta dalam kondisi tertentu melakukan kolaborasi dan aktivitas bersama. Karakteristik utama media sosial terletak pada keberadaan *user-generated content (UGC)*, yaitu konten yang dibuat dan disebarluaskan oleh pengguna, bukan oleh pihak editor sebagaimana yang terjadi pada media massa konvensional (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Berdasarkan kedua pandangan tersebut, media sosial dapat dipahami sebagai sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, bertukar informasi, bekerja sama, serta membangun hubungan sosial dengan pengguna lainnya. Selain itu, media sosial memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan, menyebarkan, dan menanggapi berbagai bentuk pesan atau informasi. Saat ini, terdapat berbagai platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, seperti *blog, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, Twitter (X), WhatsApp*, dan berbagai platform lainnya.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, media massa memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku sosial masyarakat. Berbagai informasi dan tayangan yang disajikan mampu menggambarkan realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, media massa juga memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik melalui berbagai konten yang dipublikasikan, termasuk berita. Di antara berbagai jenis media massa, televisi merupakan salah satu media yang memiliki pengaruh paling luas karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap media ini relatif tinggi dibandingkan media lainnya (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, serta kemudahan akses internet melalui berbagai perangkat seperti telepon pintar, laptop, dan komputer menjadikan literasi digital sebagai kompetensi yang penting untuk ditanamkan kepada peserta didik. Meskipun jumlah pengguna media sosial terus meningkat, pemanfaatannya belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Sebagian besar pengguna masih menggunakan media sosial untuk kebutuhan hiburan dan komunikasi, sementara hanya sebagian kecil yang memanfaatkannya secara produktif. Sebagai contoh, para influencer menggunakan media sosial sebagai sumber pendapatan, pelaku seni memanfaatkannya untuk mempromosikan karya mereka, dan para aktivis menggunakannya sebagai sarana untuk menyampaikan kritik maupun aspirasi terhadap berbagai kebijakan publik.

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi internet telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Internet memungkinkan individu di berbagai belahan dunia untuk saling terhubung serta memperoleh beragam informasi dan layanan dengan mudah. Namun demikian, penggunaan internet juga menuntut tanggung jawab dari setiap penggunanya karena tidak terdapat pihak tertentu yang secara langsung bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi dalam pemanfaatannya. Pada dasarnya, internet merupakan teknologi yang bersifat netral, terbuka, dan memberikan kebebasan kepada penggunanya. Kondisi tersebut menyebabkan semua orang dapat terhubung dan berpartisipasi di dalamnya, tetapi konsekuensi dari penggunaannya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Oleh karena itu, internet dapat dipandang sebagai ruang yang demokratis karena memberikan kebebasan kepada semua pengguna, namun tidak memiliki sistem pengaturan yang secara mutlak mengendalikan seluruh aktivitas yang berlangsung di dalamnya (Fudzini & Aulia, 2021).

Media sosial memiliki kontribusi yang penting dalam menumbuhkan kesadaran terhadap identitas nasional pada era digital. Berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, dan aplikasi pembelajaran, dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi mengenai sejarah, budaya, serta nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Selain itu,

interaksi yang berlangsung melalui media sosial dapat memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap identitas nasional sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, pemanfaatan media sosial juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, munculnya polarisasi sosial, serta kuatnya pengaruh budaya global yang berpotensi memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap identitas nasional. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara cermat, kritis, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat identitas nasional (Siregar, 2024).

Pemahaman politik melalui media sosial dan PPKn

Pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai sosial serta politik yang berlangsung melalui lembaga pendidikan maupun organisasi sosial. Implementasinya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti seminar, diskusi, pelatihan, dan keterlibatan dalam forum-forum publik. Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan wawasan peserta didik mengenai kehidupan politik sekaligus menumbuhkan kesadaran politik yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, pendidikan politik berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memperkuat kesadaran dalam berpartisipasi pada proses politik secara demokratis.

Namun, selain pendidikan politik, pemahaman politik juga terikat pada beberapa faktor lain. Beberapa faktor tersebut antara lain (1) adanya pengaruh atau perangsang; (2) karakteristik pribadi; (3) karakteristik sosial; dan (4) situasi lingkungan politik. Pendidikan politik seharusnya sudah diajarkan disekolah dengan pemahaman politik yang baik, karena tak jarang setiap perbedaan perilaku politik disebabkan oleh mutu pendidikan dasar sebelum mereka memasuki pendidikan politik. Hingga disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan hal yang krusial dan bukan pelengkap saja. Seperti yang telah disebutkan bahwa pendidikan politik itu sangat penting untuk diajarkan dari semua jenjang pendidikan untuk menghindari kebutaan terhadap politik (Ismail, 2026).

Kesadaran politik merupakan kondisi ketika warga negara, baik sebagai individu maupun anggota kelompok, memiliki pemahaman dan kesiapan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Kesadaran tersebut tidak terbentuk secara spontan, tetapi berkembang melalui proses pembelajaran dan peningkatan pengetahuan politik. Seseorang dapat dikategorikan memiliki kesadaran apabila mampu memahami serta mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, keterlibatan politik dan kesadaran politik di kalangan generasi muda perlu dibangun atas dasar orientasi terhadap pencapaian tujuan bersama (*public goods*) yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, partisipasi politik tidak hanya menjadi bentuk keterlibatan dalam proses politik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan kepentingan bersama (Kusnadi & Annisa, 2023).

Sebagai bagian dari implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pendidikan politik memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia. Pendidikan politik berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, peningkatan kesadaran politik masyarakat, pengkaderan anggota partai politik yang kompeten dan berintegritas, serta internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan demikian, penerapan pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter Pancasila, kesadaran berpolitik, dan kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi yang kuat sebagai media pendidikan politik karena substansi materinya berkaitan dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga negara. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, literasi digital juga menjadi komponen penting dalam pembelajaran karena peserta didik yang berasal dari Generasi Z cenderung memperoleh dan mengelola informasi melalui perangkat digital, termasuk media sosial dan berbagai platform berbasis internet lainnya (Yuliandari, 2023).

Implementasi pendidikan politik melalui PPKn terdiri atas tiga poin utama, yakni: kurikulum yang diterapkan, kegiatan pembelajaran, serta adanya faktor pendukung dan faktor

penghambat pendidikan politik. Dalam implementasinya, pendidikan politik yang terintegrasi melalui mata pelajaran PPKn pada kurikulum 2013 tercakup ke dalam materi-materi berdimensi politik di antaranya (1) nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara; (2) tugas dan wewenang lembaga negara; (3) hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah; serta (4) sistem dan dinamika politik di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, guru juga telah mengupayakan berbagai strategi mulai dari mengaitkan materi dengan fenomena politik yang terjadi, hingga memadukan pembelajaran berbasis demonstrasi di media sosial. Kecakapan peserta didik dalam penggunaan perangkat digital turut menjadi faktor pendukung kegiatan pembelajaran. Sementara adanya perbedaan minat belajar antar peserta didik pada mata pelajaran PPKn serta kejenuhan yang kerap dirasakan peserta didik karena materi PPKn yang terlalu luas turut menjadi faktor penghambat kegiatan pembelajaran (Cahya & Nasiwan, 2024).

Implementasi pendidikan politik tersebut kemudian tercermin ke dalam persepsi peserta didik terhadap pembelajaran yang ditandai dengan empat poin penting, di antaranya: peserta didik mendapatkan pemahaman dasar tentang politik, peserta didik mampu menganalisis permasalahan politik yang dilihatnya, namun pengetahuan dan kemampuan analisis masalah tersebut tidak sejalan dengan keterampilan partisipasi politiknya. Hal ini ditandai dengan hanya sebagian kecil peserta didik yang menunjukkan antusiasme dalam diskusi bertema perkembangan politik yang sedang terjadi. Namun meskipun demikian peserta didik merasa sudah cukup puas dengan pendidikan politik yang diperoleh melalui mata pelajaran PPKn (Cahya & Nasiwan, 2024).

Diklasifikasikan penggunaan media sosial oleh generasi Z ke dalam dua aspek. Pertama, penggunaan secara umum yang ditandai dengan empat poin penting, di antaranya: durasi yang digunakan generasi Z dalam menggunakan media sosial berkisar antara lima jam hingga lebih setiap harinya, mereka menggunakan media sosial untuk kebutuhan hiburan, mereka memanfaatkan berbagai fitur yang terdapat di media sosial, interaksi yang dilakukan umumnya dengan saling suka antar pengguna, saling mengomentari, berkomunikasi melalui pesan langsung, hingga saling menyebarkan konten yang bernuansa komedi. bukanlah hal yang mustahil apabila informasi politik tetap akan muncul dengan sendirinya dalam laman media sosial mereka melalui berbagai cara kerja algoritma media sosial. Misalnya melalui trending *X*, *fyp tik tok*, *explore instagram*, maupun karena adanya likes atau repost dari pengguna lain yang diikuti. Hal ini relevan dengan temuan yang menunjukkan bahwasanya meskipun hampir seluruh generasi Z dalam penelitian ini mengaku tidak mengikuti satu pun akun yang memberikan informasi politik namun mereka tetap mengetahui beberapa kondisi politik yang terjadi akibat paparan berita yang tidak disengaja. Walau begitu, tidak pula berhasil membawa mereka dalam keinginan untuk turut menanggapi berita politik yang mereka baca tersebut (Cahya & Nasiwan, 2024).

Media Sosial sebagai Sumber Informasi Politik bagi Siswa

Partisipasi politik merupakan elemen krusial dalam system demokrasi. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik sangat diperlukan guna menjamin keberlangsungan pemerintahan yang *representative* dan efektif. Seiring berkembangnya teknologi informasi, media social telah menjadi sarana utama dalam membentuk opini public dan meningkatkan literasi politik, khususnya di kalangan remaja. *Platfrom* seperti *Tiktok*, *X*, dan *WhatsApp* memberikan akses yang cepat dan luas terhadap informasi politik, memungkinkan generasi muda ikut serta dalam diskusi dan kampanye politik secara lebih aktif. Fenomena ini mengindikasikan adanya transformasi dalam cara remaja mengenal dan merespon isu-isu politik (Nasution, 2025).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa media sosial memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar sebagai sumber informasi. Media sosial juga berperan sebagai wadah interaksi, diskusi, ekspresi diri, serta partisipasi politik yang dapat memengaruhi pembentukan pola pikir dan orientasi politik generasi muda. Dalam konteks pendidikan politik, pemanfaatan media sosial dapat dilakukan melalui pengembangan konten edukatif yang disajikan secara kreatif dengan memanfaatkan elemen visual yang menarik, seperti video singkat, animasi, dan desain grafis informatif. Strategi penyajian konten semacam ini memungkinkan informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mampu menarik perhatian, memberikan

inspirasi, dan meningkatkan keterlibatan audiens. Platform media sosial seperti Instagram menyediakan berbagai fitur interaktif, antara lain stories, postingan gambar, dan reels, yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik secara lebih menarik melalui pemanfaatan tren digital, termasuk penggunaan musik yang sedang populer. Dengan demikian, informasi dan pesan politik yang disampaikan oleh individu maupun organisasi politik dapat diterima secara lebih efektif dan dipahami dengan lebih mudah oleh pengguna media sosial, khususnya kelompok usia muda (Natalia, 2025).

Penggunaan Konten Edukatif di Media Sosial dalam Pembelajaran PPKn

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk dalam penggunaan media pembelajaran. Pada kondisi saat ini, transformasi media pembelajaran tidak lagi dipandang sebagai pilihan, tetapi sebagai kebutuhan yang harus diakomodasi dalam proses pendidikan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab turut mengalami adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penguatan *civic literacy* yang mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis perlu dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik era digital (Hendrizal, 2025).

Integrasi media digital dalam pembelajaran PPKn memberikan berbagai manfaat, antara lain dalam meningkatkan kesadaran politik peserta didik, mendorong partisipasi sosial, serta mengembangkan etika bermedia digital. Penggunaan media sosial, komik digital, dan berbagai platform pembelajaran daring dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif sehingga mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Di samping itu, pemanfaatan digital *civic tools* memungkinkan penyampaian nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kesetaraan melalui konten yang bersifat visual dan interaktif, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh generasi muda (Hendrizal, 2025).

Dampak Pemanfaatan Media Sosial terhadap Pembelajaran Siswa

Media sosial merupakan suatu komunitas online dimana individu dapat berintegrasi, berpartisipasi, dan bertukar informasi tanpa terbatas oleh waktu dan ruang. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara tak terbatas dengan memberikan komentar, ulasan, dan berbagi informasi, sehingga menjadi alat online yang memfasilitasi pembangunan hubungan antara individu (Fatimah, 2024). Media sosial juga memiliki dampak negatif dan positif pada penerapannya. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: penyebaran *hoax* dan provokatif, *cyber bullying* dan ujaran kebencian, sikap apatis dan individualism, dan lemahnya literasi digital. Dampak positif yang diberikan antara lain, meningkatkan akses informasi, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kebangsaan, meningkatkan kesadaran sosial, membantu pengembangan Kreativitas. Untuk menjadikan media sosial bermanfaat bagi generasi muda, dampak negatifnya harus segera dihindari (Fatimah, 2024).

SIMPULAN

Media sosial dipahami sebagai platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan konten secara real-time. Di era digital, Media sosial memberikan akses cepat terhadap isu-isu politik aktual seperti pemilu, kebijakan pemerintah, hingga kasus pelanggaran HAM. Melalui infografis, video pendek, dan forum diskusi daring, siswa dapat memahami konsep politik yang abstrak menjadi lebih konkret dan kontekstual.

Penggunaan media sosial yang terarah dalam pembelajaran PPKn terbukti mampu meningkatkan kesadaran politik siswa. Ketika guru memanfaatkan media sosial sebagai ruang diskusi isu aktual, proyek kampanye nilai Pancasila, atau analisis berita hoaks, siswa menunjukkan peningkatan pada tiga aspek: pengetahuan politik, sikap demokratis, dan keterampilan partisipasi. Kuncinya adalah integrasi antara materi PPKn, literasi digital, dan pendampingan guru agar media sosial tidak hanya menjadi hiburan, tetapi menjadi sarana edukasi politik yang sehat. Dengan demikian, media sosial bukan pengganti guru, melainkan

mitra strategis untuk membentuk generasi muda yang melek politik, kritis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2024). *The state of the world's human rights: Amnesty International annual report 2024*. Amnesty International.
- Cahya, D. E., & Nasiwan. (2024). Tipologi partisipasi politik generasi Z ditinjau dari pendidikan politik melalui PPKn dan akses media sosial. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 4(12), 1053–1063. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31770>
- Dinayati, A., Saputri, I. B., Wijaya, R., Septi, S. A., & Usep, S. (2023). Konsep media pembelajaran. *Journal of Student Research*, 1(1), 282–294. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i1.993>
- Fatimah, N., Reza, A. P. A., & Sutari, D. (2024). Dampak media sosial terhadap kesadaran kebangsaan generasi muda. *Jurnal Komunikasi Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 167–173. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/1611>
- Fudzni, E. H., & Aulia, S. S. (2021). Penguatan literasi digital untuk mendukung hak warga negara di media sosial melalui pembelajaran PPKn. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.56393/didactica.v1i1.100>
- Hendrizal, Laili, I., Darwianis, Nursi, M., & Daswarman. (2025). Penguatan civic literacy melalui media digital dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(3), 2923–2930.
- Ismail, E. R., Wardhani, A. R., Wafi, A., Wijaya, D. P., & Julaihah, U. (2026). Pengembangan media interaktif berbasis website untuk edukasi pendidikan politik bagi siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(1), 13–29. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v5i1.24913>
- Kusnasi, E., & Annisa, R. N. (2023). Dampak media sosial TikTok terhadap pembentukan kesadaran politik peserta didik dalam berkewarganegaraan. *Academy of Education Journal*, 14(2), 410–422. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v5i1.24913>
- Kusumawati, I., Mardianti, D., & Paiman. (2025). Media pembelajaran dalam Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Academy of Education Journal*, 16(2), 252–263. <https://doi.org/10.47200/aoej.v16i2.3091>
- Nasution, S., Siregar, H. S., Hasugian, A., & lainnya. (2025). Peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik remaja: Studi kasus siswa kelas XII SMKN 1 Bata Natal. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 251–257. <https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v5i2.579>
- Natalia, D., Sasmita, F., & Ahmad, M. R. S. (2025). Partisipasi politik generasi Z: Peran media sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15772–15778. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28067>
- Ramadhani, S. (2025). Analisis Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia : Studi Kasus Berita Hoax dan Hate Speech. *Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media*, 12(1), 28–34. <https://doi.org/10.35905/publisistikji.v2i1.14654>
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran media sosial dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2), 154–161. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Siregar, W. M., Humaira, N. U., Rayhan, N. A., Lestari, P. A., Tarigan, P. S. B., Saragih, E. K. O., & Ginting, F. M. B. (2024). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Identitas Nasional di Era Digital. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 50–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251872>
- Susanti, D. I. (2022). Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 17–42. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363>
- Yuliandari, E., Muchtarom, M., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan politik melalui penguatan literasi digital dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 186–205. <https://doi.org/10.31800/jpt.kw.v11n1.p186-205>